

## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DAK, DAU DAN DBH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Maria Gabryella Harun

*rh.ririn415@gmail.com*

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACK

*This research aimed to examine and analyze whether the economic growth, special allocation fund (DAK), general allocation fund (DAU), and the profit sharing fund (DBH) had an effect on the capital expenditure allocation at government or province of East Java in 2017 – 2019. Furthermore, the population of this research was all districts or cities in East Java province with in 2017 – 2019 periods it obtained 114 respondents. Moreover, this research was quantitative. Besides, the research data used secondary data in a form of a budget realization statement which is presented in the report of the Central Board Statistics for districts / Cities in East Java Province 2017 – 2019. The instrument of this research used multiple linear regression analysis. Based on the research result showed that: (1) Economic Growth did not have any effect on the capital expenditure at Local government districts / cities in East Java Province, (2) Special Allocation Fund had a positive effect on the capital expenditure at local government districts / cities in East Java Province, (3) General Allocation Fund had a positive effect on the capital expenditure at local government districts / cities in East Java Province and (4) Profit Sharing Fund had a positive effect on the capital expenditure at local government districts / cities in East Java Province.*

*Keyword: economic growth, special allocation fund, general allocation fund, profit sharing fund, capital expenditure*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 38 kabupaten/kota yang mana terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan periode penelitian tahun 2017 – 2019 diperoleh sampel sebanyak 114 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran yang disajikan dalam laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2019. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (3) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan (4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil belanja modal

### PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mempercepat

pembangunan suatu daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan dapat meningkatkan pelayanan publik.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan diberbagai macam sektor terutama dalam sektor publik, dengan meningkatkan pelayanan di sektor publik maka akan mampu menarik investor untuk melakukan investasi di berbagai macam daerah yang memiliki pertumbuhan yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diharapkan pelaksanaan otonomi daerah mampu membangun daerah secara optimal dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat ataupun sebaliknya pemerintah yang kurang baik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Senada dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi juga sangat diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Dalam usaha peningkatan pembangunan ekonomi, Pemerintah akan berupaya untuk mengelola sumber daya yang ada dengan sangat baik melalui berbagai cara, salah satunya yaitu bekerja sama dengan masyarakat guna membuka lapangan pekerjaan baru di daerah yang bersangkutan. Meningkatnya pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga akan terjadinya kesejahteraan bagi masyarakat. Pada umumnya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal.

Dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap APBD. Salah satu perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah secara teoritis akan mampu meningkatkan belanja modal yang besar jika anggaran yang dihasilkan oleh DBH juga besar. Sebaliknya, jika anggaran yang dihasilkan oleh DBH kecil, maka belanja modal yang dihasilkan pun akan kecil pula.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang memiliki masa manfaat satu tahun anggaran dan akan menambah aset suatu daerah atau menambah kekayaan bagi daerah yang bersangkutan. Jenis belanja modal untuk meningkatkan aset antara lain; tanah, jalan dan jembatan, jaringan, bangunan, dan lain - lain. Rendahnya suatu belanja modal akan mempengaruhi kinerja badan pemerintah. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan suatu daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas oleh pemerintahan maupun fasilitas untuk publik. Persoalan yang berkenaan dengan belanja modal, yaitu ketika penerimaan daerah yang bersumber dari DAU, DAK, dan DBH yang mengalami penambahan namun tidak sejalan dengan peningkatan jumlah alokasi belanja modal sehingga untuk menyediakan infrastruktur bagi masyarakat belum bisa terealisasi.

Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?, (2) Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?, (3) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?, (4) Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?.

## TINJAUAN TEORITIS

### Otonomi Daerah

Dalam UU No 32 Tahun 2004 menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut (Mardiasmo, 2002) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah untuk dapat mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri, dengan hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah yang mana dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan undang – undang yang ada. Dengan diberikannya tanggung jawab yang besar kepada pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin agar mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan menurut (Rifai, 2017).

### Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 (7)). Sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dari otonomi daerah yang mana awalnya setiap sistem diputuskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerah tetapi kini pemerintah daerah telah mendapatkan kepercayaan dan wewenangnya untuk dapat mengatur setiap sistem yang ada di setiap daerahnya. Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang diberikan sebagian wewenang yang tadinya hanya bisa diputuskan oleh pemerintah pusat tetapi kini dapat diputuskan ditingkat pemerintah daerah.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU No 23 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam PP No 12 Tahun 2019 Pasal 23 (3) mengatakan APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam pasal 22 ayat 1 pendapatan daerah dikelompokkan atas tiga, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah. Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, Belanja daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, fungsi dan jenis belanja. Pembiayaan daerah itu sendiri terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan negara ke arah yang lebih baik selama periode tertentu dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan mempengaruhi tingkat pembangunan di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan output perkapita dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah penambahan nilai atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di daerah yang bersangkutan. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan suatu

tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat agar apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat.

### **Dana Alokasi Khusus**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jika Dana Alokasi Khusus dapat dilaksanakan dengan baik dan tugasnya dapat diselesaikan dengan semestinya, maka untuk mempercepat suatu pembangunan daerah juga akan semakin cepat dan masyarakat pun akan dapat menikmati apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya DAK dapat menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan cara mengutamakan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain - lain. Menurut Usman *et al.*, (2008:20), penentuan jumlah Dana Alokasi Khusus dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unit Departemen Keuangan, Bappenas, Depdagri, dan Departemen Teknis yang mana tugasnya menerima alokasi Dana Alokasi Khusus.

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum yang berasal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk dapat mengatasi suatu ketimpangan horizontal dengan tujuan utamanya yaitu pemerataan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti daerah diberikan keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum yang dominan terhadap belanja pegawai akan mempengaruhi berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal, ataupun dapat mempengaruhi berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penyediaan layanan masyarakat seperti program penanggulangan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.

### **Dana Bagi Hasil**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil dibedakan atas dua, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Dana hasil pajak terdiri dari: pajak penghasilan perseorangan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) terdiri dari; kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum serta pertambangan panas bumi.

### **Belanja Modal**

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat membantu masyarakat dalam kegiatan maupun aktivitasnya. Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan salah satu syarat dalam memberikan pelayanan publik. Setiap

tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel - variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal seperti Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil.

**Penelitian Terdahulu**

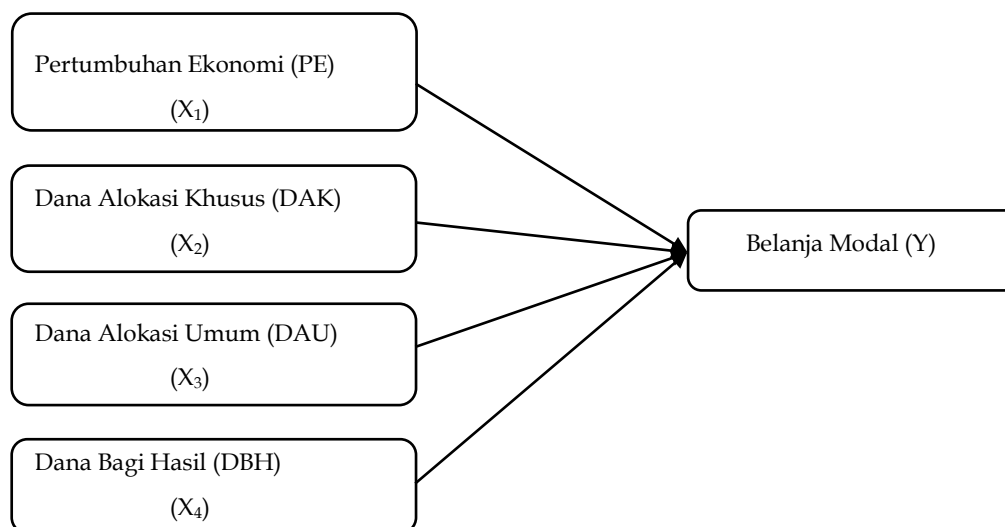
**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>Putri Agus Suyanto (2019)</b>	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	- Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
<b>Deva Yoga Permana dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013)</b>	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	- Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Sedangkan - PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal
<b>Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018)</b>	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK dan PAD Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011 - 2016	- Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal - DAU, DAK dan PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

**Rerangka Konseptual**

Berdasarkan uraian sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi rerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Rerangka Konseptual**

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Otonomi daerah memberikan wewenang, hak dan kekuasaan bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola atau mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan hal tersebut pemerintah memiliki kesempatan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan keberhasilan atas kewenangan yang diterima pemerintah daerah sekiranya pemerintah daerah dapat mengatasi pengeluarannya sendiri, baik itu pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pengeluaran belanja modal. Pengeluaran belanja modal yang dimaksud bisa dalam bentuk pembangunan infrastruktur, yang mana infrastruktur tersebut dapat digunakan oleh masyarakat/publik. Menurut Adilistiyono (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu dana perimbangan keuangan. Dana Perimbangan merupakan perwujudan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu untuk mengurangi beban biaya khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Menurut Suyanto (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara DAK dan belanja modal.

Berdasarkan landasan teori dan pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN. Tujuan diberikannya DAU adalah guna pengurangan kesenjangan kemampuan finansial antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda - beda dalam mendanai setiap kegiatannya, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maka dari untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang berasal dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Putro (2010) dan Sumarmi (2009) menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak terjadi lebih baik, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya dana perimbangan (DBH) diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat/publik. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari Pusat menuntut daerah untuk dapat membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan salah satunya yaitu pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Dengan demikian pemerintah dapat menggunakan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Menurut Mundiroh (2019) secara teoritis Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi belanja modal sejalan dengan peningkatan DBH yang diterima dari Pemerintah Pusat. Sebaliknya, sejalan dengan semakin kecil DBH yang didapat Pemerintah Daerah, maka anggaran Belanja Modal yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tersebut juga akan mengalami penurunan. Menurut Rahma (2019) menyatakan bahwa variabel dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, (Sugiyono, 2014). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kota/provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2019.

Tabel 2  
Nama - Nama Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
1. Kabupaten Pacitan	20. Kabupaten Magetan
2. Kabupaten Ponorogo	21. Kabupaten Ngawi
3. Kabupaten Trenggalek	22. Kabupaten Bojonegoro
4. Kabupaten Tulungagung	23. Kabupaten Tuban
5. Kabupaten Blitar	24. Kabupaten Lamongan
6. Kabupaten Kediri	25. Kabupaten Gresik
7. Kabupaten Malang	26. Kabupaten Bangkalan
8. Kabupaten Lumajang	27. Kabupaten Sampang
9. Kabupaten Jember	28. Kabupaten Pamekasan
10. Kabupaten Banyuwangi	29. Kabupaten Sumenep
11. Kabupaten Bondowoso	30. Kota Kediri
12. Kabupaten Situbondo	31. Kota Blitar
13. Kabupaten Probolinggo	32. Kota Malang
14. Kabupaten Pasuruan	33. Kota Probolinggo
15. Kabupaten Sidoarjo	34. Kota Pasuruan
16. Kabupaten Mojokerto	35. Kota Mojokerto
17. Kabupaten Jombang	36. Kota Madiun
18. Kabupaten Nganjuk	37. Kota Surabaya
19. Kabupaten Madiun	38. Kota Batu

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel merupakan salah satu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengambil sampel atau contoh representative dari populasi yang tersedia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Jawa Timur baik kabupaten ataupun kota dari tahun 2017 - 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang digunakan untuk tujuan, target serta pertimbangan tertentu dalam menentukannya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Dari Laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pertumbuhan Ekonomi.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu: (1) Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. (2) Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu pengalokasian belanja modal.

#### **Definisi Operasional Variabel**

Operasional variabel adalah variabel yang tidak bergantung pada variabel lain yang mana dengan cara memberikan arti. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah (1) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, (2) Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (3) Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah yang bersangkutan sesuai dengan prioritas nasional, (4) dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase yang mana untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan variabel dependennya, yaitu Belanja modal merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (memperoleh atau menambah aset tetap). Belanja modal pada dasarnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah untuk melakukan belanja daerah dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan pemerintah dalam memenuhi fasilitas publik.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi dalam rangka pemecahan masalah penelitian maupun pengujian hipotesis sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga dapat bermanfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis perhitungan menggunakan alat



bantu berupa perangkat lunak statistik yang lebih dikenal dengan sebutan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan alat ukur yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih atau menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Gozali, 2010: 96). Analisis regresi berganda akan dilakukan apabila memiliki minimal 2 variabel independen. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 DAK + \beta_3 DAU + \beta_4 DBH + \varepsilon$$

Keterangan:

BM	: Belanja Modal
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien variabel bebas
PE	: Pertumbuhan Ekonomi
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
$\varepsilon$	: Error

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data ini dapat menggunakan analisis grafik dengan melihat *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* atau bisa disebut grafik *P - plot*. Alat untuk melakukan uji normalitas terhadap masing - masing variabel pada penelitian ini dapat menggunakan metode *Kolmogorov - Smirnov*. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila tingkat signifikansinya  $> 0,05$ , namun suatu data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal apabila tingkat signifikansinya  $< 0,05$ .

#### Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Uji multikolinieritasnya: Jika nilai *Tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen. Sebaliknya, jika nilai *tolerance*  $< 0,1$  dan VIF  $> 10$  maka dapat dikatakan bahwa terdapatnya multikolinieritas antar variabel independen.

#### Uji Autokolerasi

Pengujian ini menggunakan Uji Durbin Watson yang bertujuan untuk menguji apakah terjadi kolerasi serial atau tidak dengan menghitung nilai di statistik dengan kriteria jika: (a) Angka DW di bawah -2 berarti adanya autokolerasi positif, (b) Angka DW di antara -2 dan +2 berarti tidak adanya autokolerasi, (c) Angka DW di atas +2 berarti adanya autokolerasi negatif.

#### Heteroskedastisitas

Untuk melihat ada tidaknya uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan cara melihat gambar plot antara nilai prediksi suatu variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Jika terdapat titik - titik yang menyebar pada grafik tersebut dengan secara acak

dan tidak membentuk pola dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Untuk menguji suatu heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Glejser*, yang mana jika probabilitas signifikan (Sig) > 0,05 maka dapat dinyatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas, sebaliknya jika probabilitas signifikan (Sig) < 0,05 maka dapat dinyatakan terjadinya heteroskedastisitas.

### **Uji Kelayakan Model**

#### **Uji F**

Uji F pada dasarnya dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji statistik yang digunakan dalam pengujian ini yaitu ANOVA (*Analysis of Varians*). Tingkat signifikan yang digunakan dalam Uji F adalah  $\alpha = 0,05$ , yang artinya apabila nilai signifikansi Uji F < 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi Uji F > 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### **Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa besarnya kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Nilai koefisien  $R^2$  atau *Adjusted R-Squared* yaitu 0 - 1, semakin  $R^2$  semakin mendekati angka 1 menunjukkan pengaruh yang semakin kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah.

#### **Uji Hipotesis (Uji T)**

Uji T pada dasarnya digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial apakah terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tingkat signifikan pada Uji T adalah  $\alpha = 0,05$  yang artinya jika nilai signifikansi Uji T < 0,05 maka secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi Uji T > 0,05 maka secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Obyek Penelitian**

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mana merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur terletak di Pulau Jawa yang lebih tepatnya berada di bagian Timur Pulau Jawa dengan ibu kotanya terletak di Kota Surabaya. Provinsi Jawa Timur (JaTim) di didirikan pada tanggal 12 Oktober 1945 berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1950. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Provinsi Bali yang terletak di sebelah Timur, Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sebelah Barat, Samudra Hindia terletak di bagian Selatan dan Laut Jawa di bagian Utara. Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu wilayah daratan yang mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Pulau Jawa Timur dan wilayah kepulauan Madura yang mencakup 10% saja. Total jumlah Kabupaten dan Kota Jawa Timur adalah 38 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Jawa Timur baik kabupaten ataupun kota dari tahun 2017 - 2019.

**Tabel 3**  
**Proses Pemilihan Sampel**

Keterangan	2017	2018	2019
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	38	38	38
Jumlah Sampel	38	38	38
Total Jumlah Sampel			114

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas penulis menggunakan 114 sampel laporan keuangan periode 2017, 2018 dan 2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.

**Statistik Deskriptif**

Statistik deskripsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diantaranya nilai rata - rata, maksimum dan minimum, dan standar deviasi. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hasil dari analisis deskriptif dapat disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Statistik Deskriptif**  
**(dalam jutaan rupiah)**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	114	5.782	593.026	54.80761	80.553109
DAK	114	64.451	655.835	301.93802	127.155824
DAU	114	9.302	1716.472	823.68983	395.874475
DBH	114	36.319	776.576	133.16528	102.320067
BM	114	69.465	908.717	392.97242	170.034435
Valid	N	114			
(listwise)					

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 5, sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	36.290	27.250		1.332	.186
	PE	.236	.142	.112	1.666	.099
	DAK	.761	.098	.569	7.775	.000
	DAU	.064	.030	.149	2.130	.035
	DBH	.460	.108	.277	4.250	.000

a. Dependen Variabel: Pengalokasian Belanja Modal

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

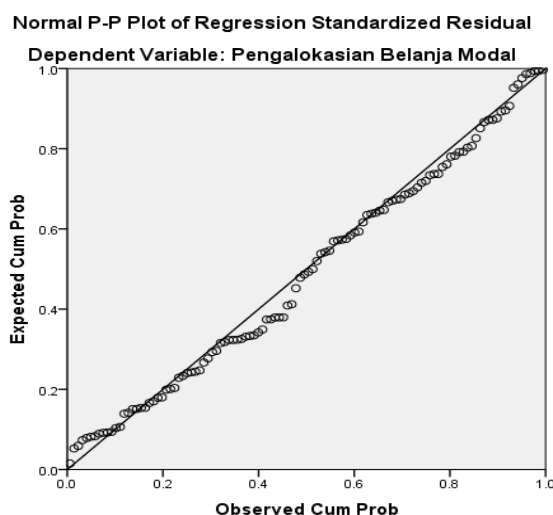
Berdasarkan nilai - nilai tersebut, maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$BM = 36,29 + 0,236 PE + 0,761 DAK + 0,064 DAU + 0.460 DBH + \varepsilon$$

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data ini dapat menggunakan analisis grafik dengan melihat Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual atau bisa disebut grafik *P - plot*. Pada grafik *P - plot* distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan distribusi dari data digambarkan dengan *ploting*. Pada Gambar 1 berikut ini menyajikan grafik *P - plot* yang dapat menggambarkan distribusi data. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS uji normalitas didapat grafik sebagai berikut:



Gambar 2  
Grafik P - plot

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 2 hasil uji normalitas data dengan menggunakan *P - plot* grafik terlihat bahwa penyebaran titik - titik mengikuti arah garis diagonal tersebut. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau dengan kata lain model regresi layak dipakai karena memenuhi salah satu asumsi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penyebaran titik - titik yang mengikuti garis diagonal. Hasil ini dapat diperkuat dengan menggunakan uji statistik lain yaitu uji sampel Test *Kolmogorov - Smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih kecil, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos uji normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji normalitas apabila nilai signifikan uji Kolmogorov - Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2010). Hasil uji *Kolmogorov - Smirnov* yang disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Kolmogorov - Smirnov**

One-Sample Kolmogorov – Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	98.08426876
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.043
Kolmogorov-Smirnov		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.079 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction

**Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021**

Dari hasil uji Kolmogorov – Smirnov pada Tabel 6 diatas, dapat disimpulkan bahwa data diatas berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,079 lebih besar dari 0,05.

**Uji Multikolinearitas**

Untuk mendeteksi tidak adanya korelasi dapat dilihat dari besaran Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak ada multikolinearitas antara variabel independen di dalam model regresi. Berikut ini hasil dari Uji Multikolinearitas:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pertumbuhan Ekonomi	.678	1.474
	Dana Alokasi Khusus	.570	1.754
	Dana Alokasi Umum	.623	1.604
	Dana Bagi Hasil	.720	1.390

- a. Dependent Variable: Pengalokasian Belanja Modal

**Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021**

Dari hasil yang disajikan menunjukkan bahwa pada Tabel 7 diatas nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari keempat variabel yaitu, PE, DAK, DAU dan DBH memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen.

### Uji Autokolerasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokolerasi di dalam model regresi dapat menggunakan Uji Durbin - Watson dengan ketentuan apabila angka DW diantara nilai -2 dan +2 berarti tidak terdinya gejala autokolerasi. Pada Tabel 8 dibawah ini akan menunjukkan hasil uji dari autokolerasi:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Autokolerasi**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	Durbin-Watson
1	1.876

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi , Dana Alokasi Khusus

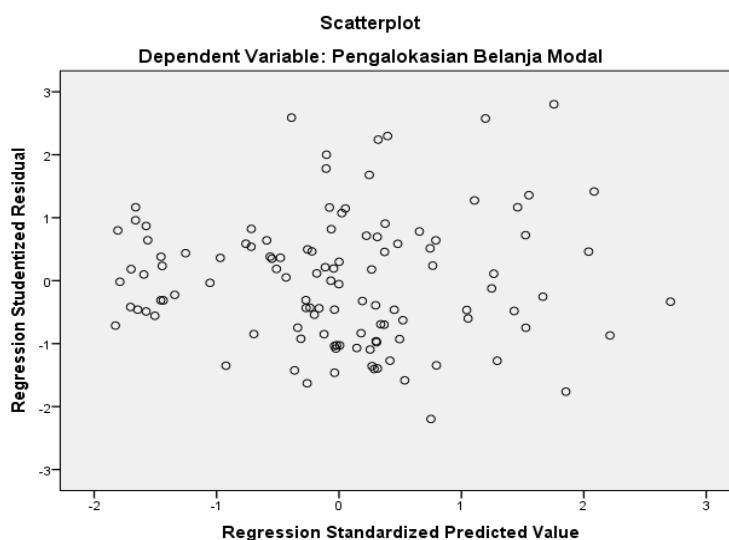
b. Dependent Variable: Pengalokasian Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Dari Tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji autokolerasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,876, yang mana nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2 maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala autokolerasi.

### Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik scatterplot antara nilai variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot. Grafik *scatterplot* disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan pada tampilan grafik scatterplot terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas apabila jika probabilitas signifikan (Sig) > 0,05. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35.689	15.030		2.375	.019
	Pe	.114	.078	.159	1.458	.148
	DAK	.047	.054	.104	.876	.383
	DAU	.037	.017	.253	2.225	.128
	DBH	-.058	.060	-.103	-.970	.334

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 9 diatas hasil uji heteroskedastisitas (*uji glejser*) menunjukkan bahwa PE, DAK, DAU dan DBH memiliki nilai signifikan > 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap absolute residual. Dengan demikian model ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

### Uji Kelayakan Model

#### Uji F

Uji F atau yang biasa disebut Uji ANOVA bertujuan untuk menguji apakah model regresi layak di gunakan atau tidak layak dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  (nilai signifikansi Uji F < 0,05). Uji F digunakan untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2019. Berikut hasil perhitungan dari Uji F:

**Tabel 10**  
**Hasil Perhitungan Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2179903.933	4	544975.983	54.642	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1087119.187	109	9973.571		
	Total	3267023.120	113			

a. Dependent Variable: Pengalokasian Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi , Dana Alokasi Khusus

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Pada Tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji F menunjukkan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$  sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian model ini layak digunakan dalam penelitian.

### Determinasi ( $R^2$ )

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi antara 1 (satu) dan 0 (nol). Jika nilai  $R^2$  mendekati 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat, sebaliknya jika nilai  $R^2$  mendekati 0 (nol) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Berikut hasil perhitungan nilai Koefisien Determinasi yang diperoleh:

**Tabel 11**  
Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 <sup>a</sup>	.667	.655	99.867765

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: Pengalokasian Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 11 hasil Koefisien Determinasi dari nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,655 yang berarti atau sebesar 65,5%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (PE, DAK, DAU dan DBH) mempengaruhi variabel dependen (BM) selama tahun 2017 - 2019 sebesar 65,5% dan sisanya sebesar 34,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

### Uji Hipotesis (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial apakah terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi yang digunakan  $\alpha = 0,05$  (nilai signifikansi Uji T < 0,05). Hasil dari pengujian Uji T adalah sebagai berikut:

**Tabel 12**  
Uji T  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.290	27.250		1.332	.186
	PE	.236	.142	.112	1.666	.099
	DAK	.761	.098	.569	7.775	.000
	DAU	.064	.030	.149	2.130	.035
	DBH	.460	.108	.277	4.250	.000

a. Dependent Variable: Pengalokasian Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Dari Tabel 12 di atas diperoleh nilai t-hitung untuk variabel PE sebesar 1,666, variabel DAK sebesar 7,775, variabel DAU sebesar 2,130 dan variabel DBH sebesar 4,250. Pada tabel tersebut menunjukkan nilai signifikan untuk PE sebesar  $0,99 > 0,05$  yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan untuk variabel DAK, DAU dan DBH memiliki nilai signifikan  $< 0,05$  yang berarti variabel DAK, DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dari hasil pengujian yang didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada Tabel 11



diatas menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,263 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,666 dengan nilai signifikansi sebesar 0,099 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak yang berarti bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja dikarenakan adanya faktor – faktor produksi yang berasal dari luar negeri dan adanya aktivitas impor yang semakin meningkat di dibandingkan aktivitas ekspor. Dan juga kurangnya pengadaan teknologi di bidang barang dan jasa yang lebih modern sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan menunjukan koefisien regresi sebesar 0,761 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,775 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yang berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional. Maka dari itu, semakin besar atau tinggi suatu daerah menerima dana alokasi khusus, maka semakin besar atau tinggi pula daerah tersebut dapat merealisasikan belanja modal dalam pembangunan, dan lain – lain. Dana Alokasi Khusus mempunyai peran yang penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggungjawab dan akuntabilitas bagi pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan dana alokasi khusus, yaitu untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian dari dana alokasi umum menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,064 dengan nilai signifikan sebesar 0,035 yang mana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima yang berarti variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal. Yang artinya semakin besar jumlah dana alokasi umum yang diperoleh pemerintah provinsi Jawa Timur maka akan semakin besar pula belanja modal yang diperoleh. Ferdiansyah *et al.*, (2018: 45) menyatakan Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum memiliki fungsi untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi yang melebihi potensinya.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu nilai koefisien regresi sebesar 0,460 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,250 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima yang berarti variabel dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur mendapatkan dana bagi hasil yang besar atau tinggi akan cenderung memiliki belanja modal yang semakin besar atau tinggi pula. Tujuan dari dianggarkannya Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan perekonomian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal di provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2019, memiliki jumlah sampel sebanyak 114 dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2019, (2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2019, (3) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2019, (4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2019.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu: (1) Bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerahnya lewat otonomi daerah dan juga mengurangi ketergantungan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan juga untuk lebih memperhatikan lagi pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang berada di pelosok desa atau di desa - desa terpencil agar mereka juga dapat menikmati infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah dan diharapkan akan pembangunannya dapat merata. Sehingga pelayanan publik akan tersedia dengan baik dan juga akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitiannya dan dapat menambahkan variabel independen dalam penelitian ini selain Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU dan DBH agar hasil dari penelitiannya dapat lebih baik. Misalnya menambah variabel SILPA, Pendapatan Asli Daerah ataupun menambah variabel non keuangan seperti penerimaan pembiayaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adilistiyono, A.E. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi S1*. STIESIA
- Ferdiansyah, I., D. R. Deviyanti, dan S. Pattisahusiwa. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*. 14(1) : 44 - 52.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mundiroh, S. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjut Indonesia*. 2(1) Januari 2019: 104 - 121.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Putro, S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi S1*. Universitas Diponegoro.

- Rahma, D. N.2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Skripsi S1*. STIESIA Surabaya.
- Rifai, R. A. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *170 e jurnal katalogis*. 5(7): 169 – 180.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sumarmi, S. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Akmenipa UPY, Vol. 4*.
- Suyanto, P. A. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(10), Oktober 2019: 1 – 23.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Usman, S, M. S. Mawardi, A. Poesoro, A. Suryahadi dan C. Sampford. 2008. *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. April 2008: 1 – 62. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.